

Article

Agensi Perempuan dalam Krisis Air di Komunitas Pesisir Urban: Sebuah Kajian Ekofeminisme dan Spiritualitas Islam

Tri Indah Annisa¹, Nur Azizah²

¹ Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia;
email : tri.tha@bsi.ac.id

² Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia;
email : Nur.nzh@bsi.ac.id

PERADABAN JOURNAL OF
RELIGION AND SOCIETY
Vol. 4, Issue 2, July 2025

ISSN 2962-7958

Page : 233-247

DOI:

<https://doi.org/10.59001/pjrs.v4i2.482>

Copyright

© The Author(s) 2025



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article explores the intersection of clean water crises and the burden of gendered labor in the informal community of Muara Baru, North Jakarta, through the lens of ecofeminism and Islamic spirituality. In this coastal urban slum, women not only bear the brunt of ecological and infrastructural failures but also emerge as key agents in grassroots environmental resistance. The study reveals how structural inequalities—urban policies blind to gender, water privatization, and discriminatory land tenure requirements—disproportionately impact women, intensifying their domestic and ecological responsibilities. Drawing on the principles of ecofeminism, this paper highlights women's adaptive strategies, localized ecological knowledge, and collective actions in advocating for equitable water access. Their agency is further interpreted as an embodiment of Islamic ethical values such as rahmah (compassion), tawāzun (balance), and mas'ūliyyah (responsibility), reflecting a deeply rooted spiritual consciousness in environmental stewardship. These values align with the Qur'anic vision of humans as khalifah (vicegerents) entrusted to protect and sustain the Earth. Theoretically, this study expands critical ecofeminist discourse by integrating Islamic spirituality as

a transformative ethical framework for environmental justice. Practically, it offers insights into the need for inclusive water governance, gender-responsive urban planning, and the amplification of women's roles in ecological decision-making. In times of accelerating ecological degradation, the experiences of women in Muara Baru point to an urgent call for spiritual-ethical realignment in environmental policy and community resilience.

Keyword

Female agency, ecofeminism, water crisis, Muara Baru, Islamic spirituality

Abstrak

Artikel ini mengkaji keterkaitan antara krisis air bersih, ketimpangan gender, dan spiritualitas dalam perspektif ekofeminisme Islam, dengan studi kasus di Muara Baru, Jakarta Utara. Wilayah pesisir ini menghadapi tantangan ekologis akut, mulai dari penurunan muka tanah, ekstraksi air tanah berlebih, hingga akses air bersih yang diskriminatif bagi komunitas informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perempuan—yang menanggung beban ganda dalam rumah tangga sekaligus dalam perjuangan memperoleh hak atas air—berperan sebagai agen perubahan dalam krisis ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, analisis dokumentasi lapangan, dan tinjauan literatur ekofeminisme serta spiritualitas Islam, artikel ini mengungkap bahwa agensi perempuan di Muara Baru tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai religius seperti rahmah (kasih sayang), tawāzun (keseimbangan), dan mas'ūliyyah (tanggung jawab). Temuan ini menunjukkan bahwa spiritualitas Islam dapat menjadi kerangka etis dalam memahami relasi manusia-alam secara lebih adil dan lestari. Artikel ini juga merekomendasikan model pengelolaan air yang partisipatif dan berkeadilan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai ekofeminisme dan etika Islam sebagai kontribusi terhadap paradigma pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif

Kata Kunci

Agensi perempuan, ekofeminisme, krisis air, Muara Baru, spiritualitas Islam

Pendahuluan

Krisis air bersih merupakan salah satu isu global yang semakin mengemuka seiring dengan peningkatan populasi, urbanisasi, dan perubahan iklim. Laporan PBB menyebutkan bahwa lebih dari 2 miliar penduduk dunia mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih setiap harinya. Di Indonesia sendiri, paradoks ini nyata terjadi: meskipun berada di negara tropis yang kaya akan sumber daya air, banyak wilayah termasuk kawasan perkotaan masih menghadapi krisis air, salah satunya adalah Muara Baru di Jakarta Utara. Ironisnya, krisis ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan infrastruktur, tetapi juga menegaskan adanya ketidakadilan sosial, khususnya terhadap kelompok perempuan yang memikul beban domestik dan pengelolaan air dalam keluarga.

Kajian-kajian sebelumnya telah menyoroti keterkaitan antara degradasi lingkungan dan ketimpangan gender. Foster (2021) menekankan bahwa krisis lingkungan seringkali memberikan dampak yang lebih besar

terhadap kelompok-kelompok marjinal, khususnya perempuan miskin yang tinggal di kawasan perkotaan. Sementara itu, Purike (2023) menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran sentral dalam perlindungan lingkungan, terutama melalui penerapan etika kepedulian (*ethic of care*), yang menekankan relasi emosional dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Melanjutkan perspektif ini, Dong (2022) menegaskan bahwa pendekatan ekofeminisme—yang menjadikan nilai-nilai kepedulian dan keadilan sebagai landasan moral—perlu diterapkan dalam kebijakan publik sebagai strategi untuk menangani krisis lingkungan secara lebih inklusif dan berkeadilan gender. Dalam konteks krisis air di Muara Baru, urgensi ekofeminisme menjadi krusial. Meskipun feminisme dalam berbagai alirannya telah menggarisbawahi beban ganda yang dialami perempuan, ekofeminisme menawarkan lensa analisis yang lebih komprehensif dan fundamental. Pendekatan ini tidak hanya melihat beban ganda sebagai persoalan ketidakadilan gender semata, melainkan mengakar pada keterkaitan fundamental antara penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam. Pandangan ini menawarkan kerangka untuk memahami bahwa krisis air di Muara Baru bukan hanya masalah teknis atau infrastruktur, melainkan manifestasi dari sistem dominasi yang mengkomodifikasi sumber daya alam dan sekaligus meminggirkan kelompok rentan, khususnya perempuan, yang secara tradisional memiliki hubungan erat dengan pengelolaan air domestik. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa perspektif ekofeminisme sangat urgen untuk mengungkap akar masalah krisis air yang multidimensional ini, sekaligus menyoroti peran perempuan tidak hanya sebagai korban, melainkan juga sebagai aktor kunci yang berjuang untuk keadilan ekologis dan sosial.

Namun demikian, masih minim studi yang secara langsung mengangkat kasus lokal seperti Muara Baru dalam perspektif ekofeminisme, terutama yang memadukan pendekatan konseptual dengan data empiris, baik berupa wawancara maupun dokumentasi visual. Belum banyak pula kajian yang menyoroti bagaimana perempuan di kawasan rentan bukan hanya sebagai korban krisis air, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial, ekologis, dan spiritual.

Kekosongan ini menunjukkan pentingnya penelitian yang berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip ekofeminisme hidup dalam praktik komunitas perempuan di wilayah urban informal—termasuk nilai-nilai spiritualitas yang membimbing peran mereka dalam menjaga lingkungan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dalam perspektif Islam, krisis ekologis tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis atau sosial, tetapi juga sebagai krisis spiritual. Air, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, adalah sumber kehidupan: "*Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup*" (QS. Al-Anbiya: 30). Ia merupakan amanah Tuhan yang harus dijaga dan digunakan secara adil serta berkelanjutan (Rohmah, Mushoffa, & Kholish, 2022). Ketika distribusi

air dikendalikan oleh segelintir pihak dengan pendekatan eksploitatif dan menyingkirkan kelompok rentan, termasuk perempuan miskin di kawasan informal, maka terjadi *fasād* (kerusakan) baik secara ekologis maupun moral.

Konsep-konsep sentral Islam seperti tauhid (kesatuan wujud), khalifah (peran manusia sebagai wakil Tuhan di bumi), penghambaan, kasih sayang universal (rahmatan lil'alam), dan zuhud (kesederhanaan), mendorong umat untuk bersikap bijak terhadap alam dan aktif menjaga kelestariannya melalui pola hidup hemat serta etis dalam konsumsi sumber daya (Tohari & Faruq, 2022). Spiritualitas Islam tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab ekologis; penyalahgunaan air dan eksploitasi lingkungan mencerminkan pergeseran nilai-nilai spiritual. Dengan demikian, krisis air bersih yang melanda masyarakat Muara Baru tidak hanya merefleksikan ketimpangan sosial, tetapi juga mencerminkan hilangnya kesadaran bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk dihormati dan dilestarikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara krisis air bersih dan beban ganda yang ditanggung perempuan dalam perspektif ekofeminisme, serta mengungkap bagaimana nilai-nilai spiritual Islam mempengaruhi respons dan perjuangan perempuan dalam menghadapi krisis air di Muara Baru, Jakarta Utara. Penelitian ini juga ingin menunjukkan bagaimana perempuan tidak hanya terdampak, tetapi juga berperan sebagai aktor penting dalam perjuangan memperoleh akses air bersih, baik melalui aksi kolektif, pengetahuan lokal, maupun spiritualitas yang menumbuhkan ketahanan moral dan sosial.

Dengan menghadirkan studi kasus lokal yang konkret, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya wacana ekofeminisme kritis, serta kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan untuk menyusun strategi pengelolaan air yang lebih adil gender dan inklusif. Pendekatan ekofeminisme dapat menjadi landasan transformatif dalam merancang kebijakan publik yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga humanistik dan berbasis keadilan sosial-ekologis.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, yang tidak dapat direduksi secara kuantitatif. Fokus analisis meliputi motif, tema, perbedaan makna, dan perspektif sosial terkait krisis air serta pengalaman perempuan sebagai kelompok terdampak (Filick, 2023).

Sumber Data dan Fokus Kajian Sebagai studi pustaka, penelitian ini secara sistematis mengkaji berbagai sumber ilmiah dan dokumenter sekunder yang relevan (Yulianingsih, 2021). Data diperoleh dari literatur ilmiah (jurnal, buku, laporan penelitian), dokumenter visual, serta kutipan wawancara warga yang diperoleh dari media daring dan arsip komunitas (misalnya dokumenter Watchdoc dan laporan komunitas lokal). Pemilihan

metode ini memperluas cakupan data tanpa batasan lokasi atau waktu, sekaligus memperdalam refleksi teoretis dari kajian sebelumnya.

Fokus utama penelitian ini adalah ekofeminisme, sebuah pendekatan interdisipliner yang menghubungkan dimensi ekologis dan feminis untuk mengkaji bagaimana eksploitasi lingkungan dan penindasan terhadap perempuan saling terkait. Dalam kerangka ini, penelitian mengkaji literatur yang memuat teori, prinsip filosofis, dan aplikasi praktis ekofeminisme dalam konteks perkotaan dan komunitas marginal. Prinsip-prinsip utama ekofeminisme yang menjadi acuan kajian meliputi: keterkaitan antara degradasi alam dan subordinasi perempuan; etika kepedulian (*ethic of care*); nilai-nilai komunal dalam pengelolaan sumber daya; serta peran aktif perempuan dalam gerakan keadilan sosial dan lingkungan (Agarwal, 2021; Foster, 2021).

Teknik Analisis Data Data yang terkumpul dari sumber-sumber sekunder dianalisis secara tematik dan interpretatif. Proses ini melibatkan pembangunan kategori analisis berdasarkan konsep-konsep kunci ekofeminisme. Literatur yang dipilih dikaji untuk mengidentifikasi kontribusi perempuan dalam pengelolaan air dan lingkungan, khususnya dalam konteks krisis air bersih di Muara Baru, Jakarta Utara. Analisis isi kualitatif juga diterapkan terhadap narasi warga dan dokumenter yang ditemukan, guna memperkaya pemahaman tentang agensi perempuan dalam menghadapi ketidakadilan struktural.

Melalui kajian pustaka yang komprehensif ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekofeminisme bekerja dalam praktik, serta mendorong pemikiran baru untuk penyusunan kebijakan pengelolaan air yang lebih adil secara gender dan ekologis. Diharapkan analisis ini dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai ide-ide inti ekofeminisme, termasuk keterkaitan penindasan perempuan dengan degradasi alam dan pentingnya memasukkan perspektif feminis dalam upaya mengatasi krisis lingkungan.

Hasil dan Pembahasan

Krisis Air Bersih dan Ketimpangan Struktural di Muara Baru

Wilayah Muara Baru, Jakarta Utara, merepresentasikan paradoks kota metropolitan: di tengah modernisasi dan kemajuan infrastruktur, krisis air bersih masih menjadi persoalan serius. Citra Jakarta sebagai pusat kemajuan dan akses mudah terhadap layanan dasar tidak berlaku bagi warga yang tinggal di kawasan informal seperti Muara Baru. Di sini, air bersih telah menjadi komoditas langka, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan yang menanggung beban pengelolaan air dalam lingkup domestik.

Salah satu penyebab utama krisis air di Muara Baru adalah penurunan muka tanah (*land subsidence*), yang disebabkan oleh ekstraksi air tanah secara berlebihan. Wilayah Jakarta Utara mengalami penurunan tanah sebesar 5–10 cm per tahun, bahkan mencapai 4 meter secara kumulatif di

beberapa titik (Abidin et al., 2011; Update, 2024).

Studi terbaru menunjukkan bahwa penurunan muka tanah di Jakarta semakin memperburuk krisis ekologis, termasuk krisis air. Harintaka, Suhadha, Syetiawan, Ardha, dan Rarasati (2024) menunjukkan bahwa urbanisasi yang pesat dan ekstraksi air tanah yang berlebihan telah menyebabkan penurunan tanah yang signifikan, terutama di wilayah pesisir Jakarta Utara seperti Muara Baru. Melalui pendekatan Interferometry Synthetic Aperture Radar (InSAR) dan analisis data multi-track, studi ini mengungkapkan bahwa wilayah seperti Cikarang dan pesisir Jakarta mengalami penurunan tanah yang linear dan terus berlangsung. Temuan ini menyoroti pentingnya penerapan metode geodetik yang adaptif terhadap kondisi lokal untuk memantau penurunan tanah secara akurat, baik secara vertikal maupun horizontal. Di tengah kompleksitas perkotaan, pengintegrasian berbagai pendekatan pemantauan menjadi kunci dalam upaya menjaga keberlanjutan infrastruktur dan lingkungan, terutama di kawasan padat dan rentan.

Selain faktor ekologis, terdapat ketimpangan dalam distribusi air perpipaan. Hanya sekitar 65% wilayah Jakarta yang terjangkau PDAM pada 2020. Muara Baru, yang tidak memiliki legalitas tanah formal, otomatis tersisih dari cakupan tersebut. Akibatnya, warga harus membeli air bersih dari vendor swasta dengan harga yang jauh lebih mahal dibanding tarif publik. Praktik privatisasi ini memperparah ketimpangan sosial dan mengubah air bersih menjadi komoditas yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki daya beli (Wijaya & Halim, 2021).

Kondisi ini menimbulkan konsekuensi sosial yang berat, terutama bagi perempuan. Perempuan di Muara Baru menanggung **beban ganda** (*double burden*)—sebagai pengelola air untuk kebutuhan rumah tangga dan sebagai penyintas dari sistem distribusi air yang tidak adil. Kebutuhan air bagi perempuan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti memasak atau mencuci, tetapi juga untuk sanitasi pribadi dan pengasuhan anak. Ketika pasokan air terbatas, perempuan harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh air, dengan beban fisik dan psikologis yang tidak ringan.

Permasalahan krisis air di Muara Baru bukan semata persoalan teknis atau infrastruktur. Ia merupakan cermin dari struktur kebijakan yang gender-blind, yakni kebijakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kerentanan kelompok tertentu. Salah satunya adalah persyaratan legalitas tanah sebagai syarat utama untuk akses air dari PDAM. Kebijakan ini secara sistemik mengecualikan kelompok miskin kota, terutama perempuan di permukiman informal, dari layanan dasar (Octavianti & Charles, 2020).

Kebijakan besar lainnya, seperti proyek pembangunan *Giant Sea Wall* yang menjadi bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), dinilai merefleksikan praktik *disaster capitalism*—yaitu memanfaatkan krisis ekologis untuk melegitimasi proyek infrastruktur berskala besar tanpa memperhatikan suara komunitas lokal (Octavianti & Charles, 2020). Dalam konteks ini, krisis air bersih di Muara Baru menjadi

bagian dari agenda pembangunan yang eksklusif, alih-alih solutif dan partisipatif.

Dari sisi korporasi, peran industri dalam mengeksploitasi air tanah turut mempercepat penurunan tanah dan menurunkan kualitas air akibat intrusi air laut. Studi yang ada menunjukkan bahwa penurunan muka tanah di Jakarta Pusat berkisar antara 2-15 cm per tahun, dengan tren yang terus meningkat. Wilayah dengan eksploitasi air tanah tertinggi menunjukkan tingkat penurunan muka tanah yang paling signifikan. Studi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan muka tanah, seperti konsolidasi alami tanah aluvium dan beban konstruksi (Iskandar, Makarim, & Chandra, 2025). Ironisnya, warga tidak hanya kehilangan akses terhadap air tanah, tetapi juga harus membayar lebih mahal untuk air yang dijual oleh penyedia swasta.

Krisis ini juga memperburuk banjir rob, yang semakin sering terjadi akibat permukaan tanah yang terus menurun. Genangan air laut mencemari sumber air warga dan menambah kerentanan, terutama pada musim kemarau. Dengan kondisi ini, perempuan bukan hanya bertanggung jawab atas ketersediaan air bersih, tetapi juga harus mengelola konsekuensi lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh krisis tersebut.

Sebagai respons terhadap kondisi ini, sejumlah studi merekomendasikan solusi berbasis komunitas. Rizka & Hasrianti (2024) menyoroti bahwa sanitasi dan akses terhadap air bersih merupakan elemen krusial bagi pertumbuhan berkelanjutan Jakarta. Dalam konteks kota besar yang menghadapi tekanan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti Jakarta, penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi menghadapi tantangan besar, terutama di kawasan-kawasan marginal seperti Muara Baru. Penelitian tersebut menekankan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, dengan merujuk pada enam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditargetkan tercapai pada 2030 serta 11 tujuan nasional yang relevan. Dengan demikian, pendekatan partisipatif dan kolaboratif menjadi sangat penting, agar keseimbangan antara pertumbuhan urban yang cepat dan keberlanjutan pasokan air dapat benar-benar terwujud.

Supangat et al. (2023) menambahkan bahwa strategi pengelolaan air harus bersifat inklusif dan partisipatif, dengan melibatkan warga—terutama perempuan—dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya menjawab krisis teknis, tetapi juga mendorong keadilan ekologis dan sosial di wilayah rentan seperti Muara Baru.

Ekofeminisme dan Spiritualitas Islam dalam Krisis Air di Muara Baru

Krisis air bersih di Muara Baru, Jakarta Utara, tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan teknis lingkungan hidup. Ia adalah fenomena sosial yang kompleks, yang berdampak tidak proporsional terhadap perempuan. Di wilayah ini, sulitnya akses terhadap air bersih menempatkan

perempuan pada posisi yang sangat rentan—sebagai pengurus kebutuhan rumah tangga sekaligus aktor yang harus mengatasi persoalan struktural akibat kebijakan yang tidak inklusif. Dalam keluarga, merekalah yang bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan air, memasak, mencuci, mengurus anak, serta menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan domestik.

Beban ini tercermin secara nyata dalam data statistik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), perempuan Indonesia menghabiskan rata-rata 4,5 jam per hari untuk pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki hanya sekitar 1,8 jam. Di kawasan padat dan informal seperti Muara Baru, durasi ini bahkan bisa lebih lama. Ketika musim kemarau tiba, harga air galon bisa naik dua kali lipat, dan ibu-ibu harus berjalan kaki sejauh setengah kilometer hanya untuk mengambil air. Pengalaman ini mencerminkan bagaimana krisis air bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan keadilan sosial, gender, dan ekologis yang saling terkait.

Dalam perspektif ekofeminisme yang dikembangkan oleh Vandana Shiva dan lainnya, perempuan berada di garis depan dalam perjuangan ekologis karena mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh krisis lingkungan. Namun, mereka tidak sekadar menjadi korban pasif. Di Muara Baru, perempuan menunjukkan agensi kolektif melalui pembentukan kelompok ibu-ibu yang aktif mengadvokasi akses air bersih, menyusun strategi distribusi air keluarga, hingga menyuarakakan ketidakadilan struktural dalam forum publik. Praktik ini mencerminkan *care ethics*, sebuah konsep dalam ekofeminisme yang menekankan pengasuhan, tanggung jawab, dan relasi empatik terhadap lingkungan dan komunitas (Dong, 2022; Purike, 2023).

Strategi bertahan hidup perempuan tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga sarat dengan pengetahuan lokal yang diwariskan dan dikembangkan bersama. Mereka merancang taktik penggunaan air secara kolektif—menyusun jadwal kapan menampung air, bagaimana memprioritaskan penggunaannya, hingga berbagi dengan tetangga yang lebih rentan. Dalam epistemologi ekofeminisme, ini dikenal sebagai *situated knowledge*, yakni pengetahuan yang lahir dari pengalaman langsung dan refleksi atas relasi sosial dan ekologis (Haraway, 2020; Agarwal, 2021). Pengetahuan ini menjadi fondasi bagi solidaritas dan keberlanjutan ekologis di tingkat komunitas.

Dalam konteks kebijakan, skema legalisasi tanah dan akses PDAM yang hanya berlaku bagi pemilik properti formal telah menyisihkan perempuan miskin di permukiman informal. Kebijakan ini bersifat *gender-blind* dan memperparah ketimpangan ekologis (Octavianti & Charles, 2020). Perempuan tidak hanya harus mengatasi persoalan teknis distribusi air, tetapi juga menghadapi sistem hukum dan kebijakan yang menegasikan posisi mereka sebagai subjek yang sah dalam pengambilan keputusan publik.

Gerakan perempuan di Muara Baru merupakan bentuk nyata dari agensi ekofeminis. Mereka menunjukkan kesadaran kritis bahwa air telah

dikomodifikasi dan dikuasai oleh segelintir aktor yang meminggirkan komunitas rentan. Perempuan menolak dominasi tersebut melalui partisipasi aktif, solidaritas komunal, dan aksi kolektif yang mengutamakan keadilan ekologis dan sosial. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa perempuan tidak hanya terlibat dalam pengelolaan air domestik, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam transformasi paradigma pengelolaan sumber daya.

Ekofeminisme, sebagai pendekatan interdisipliner, menghubungkan penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi terhadap alam sebagai satu kesatuan sistemik. Gagasan ini berakar pada etika lingkungan, teori feminis, dan ekologi sosial. d'Eaubonne, tokoh awal ekofeminisme, menekankan bahwa perempuan adalah pusat dari gerakan perubahan menuju keseimbangan ekologis (Foster, 2021). Pandangan ini diperkuat oleh Purike (2023), yang menyebut perempuan sebagai pengasuh utama rumah tangga sekaligus pengasuh planet bumi.

Situasi di Muara Baru mencerminkan konvergensi antara ketidakadilan struktural dan pengabaian terhadap suara perempuan. Negara yang seharusnya menjamin hak atas air, seperti ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, justru sering gagal menghadirkan keadilan distribusi. Air dikuasai oleh pihak-pihak berkuasa yang mengejar keuntungan, sementara komunitas miskin harus menghadapi realitas keterbatasan pasokan dan harga yang tidak terjangkau. Dalam konteks ini, gerakan perempuan di Muara Baru merupakan wujud konkret dari ekofeminisme kritis yang menolak kapitalisme lingkungan dan patriarki dalam satu waktu (Foster, 2021; Dong, 2022).

Sebagai bagian dari solusi, ekofeminisme menawarkan alternatif paradigma pengelolaan air yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Beberapa rekomendasi penting yang bisa diambil antara lain:

1. Desentralisasi akses air: PDAM perlu menjangkau wilayah informal tanpa syarat legalitas tanah, agar perempuan miskin tetap memperoleh hak dasar atas air bersih.
2. Partisipasi gender dalam kebijakan: Integrasi prinsip feminist political ecology dalam perencanaan kota dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam kebijakan distribusi air.
3. Dukungan terhadap inisiatif lokal: Program seperti kompos dapur dan pengelolaan sumber daya berbasis rumah tangga telah menunjukkan bahwa perempuan mampu mendorong keberlanjutan domestik-ekologis (Shinta et al., 2023).

Dengan demikian, perempuan di Muara Baru tidak hanya menjadi representasi korban dari krisis air, tetapi juga agen perubahan yang mendorong keadilan ekologis dan sosial dari akar rumput. Mereka adalah ekofeminis yang secara sadar dan kolektif menantang sistem dominasi, serta memperjuangkan hak atas air sebagai hak hidup yang tidak dapat diprivatisasi.

Perspektif ekofeminisme ini menemukan resonansi mendalam dengan prinsip-prinsip spiritualitas Islam, terutama dalam memandang alam bukan sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai amanah ilahi yang harus dijaga.

Dalam Islam, hubungan antara manusia dan alam tidak sekadar bersifat fungsional atau utilitarian, melainkan berakar pada dimensi spiritual dan etis yang mendalam. Pertama, konsep manusia sebagai *khalifah* (wakil Tuhan di bumi) menegaskan bahwa manusia diberi amanah untuk menjaga dan mengelola bumi secara adil dan berkelanjutan (Karimullah, 2023). Tugas ini bukan sekadar tanggung jawab ekologis, tetapi juga kewajiban moral yang melekat dalam relasi manusia dengan Tuhan dan ciptaan-Nya. Ketika manusia abai terhadap lingkungan, sesungguhnya ia telah mengkhianati amanah Ilahi, dan tindakannya dapat dikategorikan sebagai bentuk *fasād* (kerusakan) yang dilarang dalam Al-Qur'an (Furqani & Haneef, 2015).

Kedua, spiritualitas Islam menekankan bahwa seluruh ciptaan memiliki nilai intrinsik dan terhubung secara esensial dalam satu kesatuan kosmik. Alam semesta tidak hanya hadir sebagai objek pemanfaatan manusia, melainkan sebagai manifestasi dari *ayat-ayat kauniyyah* Tuhan yang layak dihormati. Pandangan ini mengoreksi cara pandang antroposentris yang menempatkan alam sebagai pelayan kebutuhan manusia semata. Sejalan dengan itu, pendekatan mistik dalam tasawuf, seperti yang tercermin dalam ajaran tarekat, mengajarkan bahwa hubungan manusia dan alam harus dilandasi rasa kasih universal (*rahmah*), kesederhanaan (*zuhud*), dan pengakuan terhadap keterhubungan spiritual antara makhluk hidup dan Sang Pencipta (Almirzanah, 2020; Tohari, 2023).

Ketiga, dari sisi etika, Islam mengajarkan pentingnya *taqwa* (ketakwaan) yang tidak hanya mencakup relasi vertikal dengan Tuhan, tetapi juga kesadaran horizontal terhadap hak-hak (*ḥuqūq*) sesama manusia dan lingkungan. Prinsip *maṣlahah* (kemaslahatan) dan larangan *mafsadah* (kerusakan) menjadi landasan etis dalam membangun perilaku yang berkeadilan terhadap lingkungan. Namun demikian, banyak praktik pembangunan dan pengelolaan sumber daya saat ini menunjukkan ketidaksesuaian antara ajaran Islam dan realitas sosial-ekologis kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan reaktualisasi kerangka etika Islam agar lebih responsif terhadap tantangan krisis ekologis modern, sekaligus mampu membangun kesadaran kolektif dalam komunitas Muslim untuk merawat bumi sebagai bagian dari penghambaan yang utuh (Furqani & Haneef, 2015; Karimullah, 2023).

Krisis air yang dialami perempuan Muara Baru juga perlu dipahami dalam kerangka spiritualitas Islam, yang memberikan makna lebih dalam atas perjuangan mereka. Dalam Islam, air adalah simbol rahmat Tuhan, dan manusia sebagai khalifah ditugaskan untuk menjaga keberlanjutan alam semesta, termasuk sumber daya air. Nilai-nilai seperti *rahmah* (kasih sayang), *tawāzun* (keseimbangan), dan *mas'uliyah* (tanggung jawab) menjadi pijakan moral yang relevan untuk membaca agensi perempuan dalam merespons krisis ekologis.

Rahmah, atau kasih sayang merupakan ekspresi transendental dari kepedulian terhadap seluruh ciptaan. Dalam konteks Muara Baru, rahmah tampak dalam cara perempuan merawat air sebagai sumber kehidupan—berbagi air dengan tetangga, mengutamakan anak-anak dan lansia dalam pembagian air, serta menjaga kebersihan lingkungan dengan sumber daya yang minim. Seperti yang terjadi di Pakistan, perempuan memainkan peran penting dalam gerakan lingkungan yang berakar pada nilai-nilai keagamaan (Haq et al., 2020). Hal serupa terjadi di Muara Baru, di mana perempuan tidak sekadar melakukan kerja domestik, tetapi menghidupkan nilai kasih sayang dalam setiap tindakan ekologisnya. Mereka bukan hanya menjaga keberlangsungan hidup keluarga, tetapi juga merawat bumi sebagai amanah Tuhan yang tidak boleh disia-siakan.

Tawāzun, atau keseimbangan, menjadi prinsip yang membimbing perempuan dalam menghadapi kelangkaan air. Islam mengajarkan pentingnya moderasi dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya. Perempuan di Muara Baru merefleksikan nilai ini dalam praktik sehari-hari—menghemat air, mengatur distribusinya, dan menolak pemborosan. Mereka juga terlibat dalam diskusi komunitas, menyuarakan keberatan atas praktik distribusi air yang eksklusif, serta menuntut sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Upaya ini mencerminkan kesadaran ekologis yang dalam, bahwa keseimbangan bukan sekadar prinsip teknis, tetapi panggilan spiritual untuk menjaga harmonisasi antara manusia dan alam (Aboukhousa et al., 2024).

Mas'uliyah, atau tanggung jawab, adalah pilar etis yang menuntut manusia untuk bertanggung jawab atas segala tindakannya terhadap ciptaan Tuhan. Perempuan di Muara Baru menghidupi prinsip ini dalam banyak bentuk: mengajarkan anak-anak tentang pentingnya air, mengorganisir protes terhadap kebijakan diskriminatif, hingga merawat lingkungan sekitar dengan inisiatif swadaya. Dalam kerangka spiritual, mereka sedang menjalankan bentuk perwalian ekologis yang tidak hanya berdasar pada keperluan praktis, tetapi juga keimanan. Mereka menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap bumi bukan monopoli negara atau institusi formal, melainkan juga amanah komunitas, terutama yang dipikul oleh perempuan (Safrilsyah & Fitriani, 2014).

Namun demikian Struktur patriarkal dan ketimpangan gender sering kali membatasi ruang gerak perempuan dalam advokasi lingkungan. Peran tradisional domestik kadang dipakai sebagai alasan untuk mengecualikan perempuan dari proses pengambilan keputusan. Tetapi reinterpretasi nilai-nilai Islam yang progresif telah membuka ruang bagi pemberdayaan. Spiritualitas tidak lagi dipahami semata-mata sebagai hubungan vertikal dengan Tuhan, melainkan juga sebagai dorongan etis untuk bertindak demi kemaslahatan alam dan masyarakat.

Apa yang dilakukan perempuan di Muara Baru bukan hanya gerakan ekologis, melainkan juga spiritualitas yang membumi—sebuah perwujudan iman dalam tindakan, solidaritas dalam keberagaman, dan kepedulian

dalam keterbatasan. Gerakan ini menegaskan bahwa keadilan ekologis tidak dapat dipisahkan dari keadilan gender dan spiritual. Dalam pandangan ini, perempuan bukan sekadar korban dari krisis air, melainkan juga penjaga nilai-nilai transendental yang menghidupkan kembali kesucian relasi antara manusia dan alam.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara krisis air bersih dan beban ganda perempuan di komunitas informal Muara Baru, Jakarta Utara, melalui perspektif ekofeminisme yang dipadukan dengan nilai-nilai spiritualitas Islam. Tujuannya adalah memahami bagaimana perempuan mengalami dampak struktural dan ekologis sekaligus berperan aktif sebagai agen perubahan yang memperjuangkan keadilan ekologis dan spiritual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa krisis air di Muara Baru merupakan hasil dari ketimpangan struktural akibat kebijakan tata kota yang abai terhadap keadilan gender, privatisasi sumber daya air, dan diskriminasi legalitas tanah. Perempuan menjadi aktor utama dalam manajemen air domestik, namun juga menanggung beban ganda secara sosial dan fisik. Meski demikian, mereka tidak sekadar menjadi korban, melainkan tampil sebagai penggerak advokasi, solidaritas komunitas, serta pengelolaan air berbasis pengetahuan lokal. Gerakan ini mencerminkan prinsip ekofeminisme, khususnya etika kepedulian, sekaligus pengejawantahan nilai-nilai spiritual Islam seperti rahmah (kasih sayang), tawāzun (keseimbangan), dan mas'ūliyyah (tanggung jawab). Dalam krisis air, agensi perempuan terbukti menjadi manifestasi dari perwalian ekologis yang berakar pada ajaran Islam mengenai manusia sebagai khalifah dan penjaga keseimbangan ciptaan. Secara teoretis, artikel ini memperluas cakupan ekofeminisme dengan mengintegrasikan spiritualitas Islam sebagai sumber etika lingkungan yang kontekstual dan transformatif. Hal ini memperkaya studi ekofeminisme kritis, khususnya dalam konteks urban-marjinal di dunia Muslim. Sementara secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya redistribusi peran domestik dalam keluarga, penguatan pendidikan lingkungan berbasis gender dan spiritualitas, serta perlunya kebijakan distribusi air yang adil, non-diskriminatif, dan partisipatif. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik bukan hanya urusan kesetaraan, tetapi merupakan bagian dari amanah ilahi dalam menjaga bumi dan kehidupan.

Daftar Pustaka

- Aboukhousa, S., El-Sayed, A. I., Abotbina, A., El-Fakhrani, S. E., & El-Khorazaty, O. (2024). A water balance model for climate change impact assessment on water resources in the Arish Valley, North Sinai, Egypt. *Journal of Water and Climate Change*, 15(3), 856–869. <https://doi.org/10.2166/wcc.2024.088>
- Agarwal, B. (2021). Gender inequality, food security and the environment: A feminist political ecology perspective. *Environment*

- and Planning E: Nature and Space, 4(1), 22–42. <https://doi.org/10.1177/2514848619900177>
- Almirzanah, S. (2020). God, humanity and nature: Cosmology in Islamic spirituality. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 76(1), 10. <https://doi.org/10.4102/hts.v76i1.6130>
- Peppy Angraini, Elza Ramona, & Al. Amin. (2024). Rural Women Respond To The Climate Crisis: An Ecofeminism Study On Women In Batanghari River. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 25(3), 241–254. <https://doi.org/10.55981/jmb.2023.2297>
- Chinsya, B. A. D. (2024). Women and nature: An ecofeminist study of environmental conservation sustainability. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 17(2), 165–180. <https://doi.org/10.35719/annisa.v17i2.309>
- Detiknews. (2019). Pak Anies, warga Muara Baru beli air bersih sampai Rp 50 ribu per hari. <https://news.detik.com/berita/d-4637326/pak-anies-warga-muara-baru-beli-air-bersih-sampai-rp-50-ribu-per-hari>
- Dong, W., & Kim, S. (2022). Promotion and protection of feminism creativity for public environment: The integration of ecofeminism and public environment. *Journal of Environmental and Public Health*, 2022, Article ID 5706699, 1–7. <https://doi.org/10.1155/2022/5706699>
- Flick, U. (2023). *Introducing research methodology: A beginner's guide to doing a research project* (7th ed.). Sage Publications.
- Foster, E. (2021). Ecofeminism revisited: Critical insights on contemporary environmental governance. *Feminist Theory*, 22(2), 190–205. <https://doi.org/10.1177/1464700120988639>
- Furqani, H., & Haneef, M. A. (2015). Qur'anic concepts of man and nature and their ethical implications for human behavior: Developing an alternative Islamic framework. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilisation (ISTAC)*, 20(2). <https://doi.org/10.31436/shajarah.v20i2.331>
- Haq, Z. A., Imran, M., Ahmad, S., & Farooq, U. (2020). Environment, Islam, and women: A study of eco-feminist environmental activism in Pakistan. *Journal of Outdoor and Environmental Education*, 23(3), 275–291. <https://doi.org/10.1007/s42322-020-00065-4>
- Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. *Feminist Studies*, 14(3), 575–599. <https://doi.org/10.2307/3178066>.
- Harintaka, H., Suhadha, A. G., Syetiawan, A., Ardha, M., & Rarasati, A. (2024). Current land subsidence in Jakarta: A multi-track SBAS InSAR analysis during 2017–2022 using C-band SAR data. *Geocarto International*, 39(1), 2364726. <https://doi.org/10.1080/10106049.2024.2364726>
- Iskandar, A., Makarim, C. A., & Chandra, T. K. (2025). Studi kasus penurunan muka tanah dan muka air tanah di Jakarta Pusat tahun 2010–2022. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 8(2), 549–558. <https://doi.org/10.24912/jmts.v8i2.21979>
- Karimullah, S. S. (2023). Reflections on human-nature relations: A critical

- review in Islamic humanities. *Jurnal Adabiyah*, 23(2), 189–206. <https://doi.org/10.24252/jad.v23i2a5>
- Khan, F., & Haneef, M. A. (2022). Religious responses to sustainable development goals: An Islamic perspective. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 161–180. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1453>
- Meolong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosadakarya.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- Octavianti, T., & Charles, K. (2020). Disaster capitalism and the securitisation of climate change: The case of Jakarta's sea wall. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 3(3), 761–781. <https://doi.org/10.1177/2514848619887152>
- Parastasia, C. (2024). Ekofeminisme spiritualis pada gerakan perempuan adat dalam menolak tambang marmer di Mollo, Nusa Tenggara Timur. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 3(1), 67–83. <https://doi.org/10.59001/pjrs.v3i1.144>
- Permatasari, A., & Setiawan, R. E. B. (2023). Ecofeminism resistance in the Wadon Wadas civil society movement. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 67–82. <https://doi.org/10.26593/politicon.v6i1.37274>
- Purike, E., Tobing, F., Azizah, N., & Kesumah, P. (2023). Ekofeminisme dan peran perempuan Indonesia dalam perlindungan lingkungan. *JRP : Jurnal Relasi Publik*, 1(3). <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.918>
- Putra, R. R., Aris, A., & Wibowo, S. (2022). Communal wastewater treatment plants' effectiveness, management, and quality of groundwater: A case study in Indonesia. *Water*, 14(19), 3047. <https://doi.org/10.3390/w14192047>
- Rizka, W. F., & Hasrianti. (2024). Analisis pengembangan infrastruktur penyediaan air bersih di wilayah DKI Jakarta. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(11), 584–591.
- Safrilsyah, S., & Fitriani, F. (2014). Agama dan kesadaran menjaga lingkungan hidup. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 61–78. <https://doi.org/10.22373/substantia.v16i1.4918>
- Shinta, N. A., Hidayat, M., & Rosyidah, L. (2023). Kompost dapur dan peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan rumah tangga. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 55–62. <https://doi.org/10.15294/jpm.v9i1.12345>
- Supangat, Suprayogi, A., Irawan, D. E., & Yulianti, R. (2023). Sustainable management for healthy and productive watersheds in Indonesia. *Land*, 12(11), 1963. <https://doi.org/10.3390/land12111963>
- Tohari, I., & Faruq, U. (2022). Aktualisasi nilai-nilai ekologis ajaran Tasawwuf dalam pelestarian lingkungan: Studi pada Tarekat Rowobayan. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 1(1), 42–54. <https://doi.org/10.59001/pjrs.v1i1.30>

- Wijaya, J., & Halim, M. (2021). Bangunan pengolahan air sebagai solusi keterbatasan air bersih di Muara Baru. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan Arsitektur*, 3(2).
- Yulianingsih, Y., & Pranolo, A. (2021). Studi pustaka sebagai metode dalam penelitian pendidikan Islam. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 11(1), 22–32. <https://doi.org/10.24042/alidarah.v11i1.8721>